

THINK GLOBAL THINK MARITIM

PENDAHULUAN

Kajian globalisasi membawa wacana baru, yang kadang disebut sebagai wacana turunan (baca: reaksi). Think Asean dan Think maritim, misalnya. Globalisasi di samping memberi efek segar kepada semua manusia dan negara, dalam bentuk akselerasi waktu-komunikasi, yang melahirkan saling ketergantungan-pemahaman antara satu negara dan negara lainnya, juga mempunyai dampak laten, yaitu sikap defence dan proteksi.

Sikap defence-protektif masing-masing negara dianggap wajar mengingat kondisi sosial-ekonomi warga dunia yang tidak berimbang. Ya, sikap regulator tersebut dianggap sebagai tindakan rasional dalam menghadapi “seragan” global yang cukup massive hingga tatanan paling bawah warga masyarakat.

Salah satu bentuk proteksi negara tersebut adalah melihat kelebihan yang harus ditonjolkan sebagai alat bargaining positions. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan melihat bahwa salah satu keunggulan yang harus dijaga adalah sektor maritim. Dengan demikian, ketika Indonesia berbicara secara global, mau tidak mau, akan berbicara pada sektor maritim. Poros maritim yang dikumandangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini dikarekan nilai-nilai strategis yang terkandung pada sektor maritim.

Think global maritim actions

Di samping itu, sistem korup dunia karena ketidakmampuan negara adidaya menguasai mengelola tata global melahirkan sistem, cara pandang, hingga implementasi kebijakan yang salah kaprah (gagal paham). Ambil contoh Amerika Utara dan Indonesia. Amerika Utara sebagai salah satu proyek percontohan negara pos Industri, yang mengandalkan produk industri, justru mampu mengimpor hasil agrikultura. Sebaliknya Indonesia yang nota bene

sebagai negara yang memiliki tanah luas tidak mampu berlari cepat untuk Swasembada Pangan (beruntung Kabinet Indonesia Hebat memiliki Menteri Pertanian saat ini), yang berani mencanangkan ide tersebut setelah puluhan tahun Indonesia Merdeka.

Juga diakui atau tidak, peran dan keberanian menteri Kelautan saat ini (terlepas plus-minusnya) menjadi titik tolak kesadaran semua kalangan pentingnya Penguatan Regulasi dan Implementasi Poros Maritim. Poros Maritim sudah mampu dilihat sebagai cara Indonesia berdaulat ketika duduk bersama semua kalangan dunia, dan berbicara tentang tata kelola global.

Artinya, ketika Indonesia berpikir global, ingin mempunyai kekuatan di konferensi Internasional, salah satu yang harus didengungkan adalah Nilai Strategis Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Strategi Maritim: Restorasi Indonesia

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan penguatan-penguatan Negara dan Warga. sebagai Negara Demokratis-Berdaulat dan warga Bebas-Mardeka, menegakkan muruah (baca: kewibawaan) kita dengan Strategi Maritim. Pun demikian, ketika kita berbicara tentang Restorasi atau pengembalian masa kejayaan Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan fokus kajiannya adalah Poros Maritim. Ya, Indonesia pernah jaya karena lautnya; Indonesia punya nilai strategis karena fakta-fakta sejarah Indonesia sebagai Kepulauan.

Sehingga Konsepsi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, dengan meninjau masa lalu kejayaannya tidak bisa lepas dari konsepsi hingga kebijakan yang utuh tentang Poros Maritim. Artinya restorasi Indonesia yang sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah disektor kelautan. Sebagaimana diketahui sektor kelautan membawa banyak dampak positif;

mulai dari kesejahteraan dan peningkatan daya beli warga (sektor ekonomi); hingga kedaulatan negara.

Implementasi poros maritim

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi yang besar menjadi poros maritim dunia, dengan demikian kedaulatan dan kewibawaan NKRI di mata dunia akan tegak dan dihargai sebagai salah satu kekuatan dalam peta global. Pemerintah Jokowi-JK telah mencanangkan lima pilar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kita dapat membaca sekilas wacana poros maritim pemerintahan saat ini (*baca lebih lengkap di <http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>*)

Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Pilar kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar empat adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

Pilar kelima adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera. “Sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,” kata Presiden Jokowi dengan tegas.

Lima pilar di atas adalah spirit maritim dan bentuk konkrit menjaga ketahanan dan keutuhan NKRI. Selanjutnya adalah tugas kita bersama sebagai elemen bangsa untuk menjaga spirit maritim ini, serta mengevaluasi langkah-langkah dan kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng. Spirit maritim bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas semua warga negara Indonesia.